POINT
Jurnal Ekonomi & Manajemen

**POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen**
**Volume 5 Nomor 2, Desember 2023**
e-ISSN : 2656-775X

# *Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh*

**Jamaluddin**[1]*, **Anwar Enre** [2]
[1]Jamaluddin, Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Makassar; jamaluddin@ucm-si.ac.id
[2]Anwar Enre, Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Makassar; acyut.07@gmail.com

*Penulis korespondensi: acyut.07@gmail.com; Tel.: 081347354696

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi salah satu teori dalam keuangan syariah yakni teori agensi dalam kaitannya dengan meminimalisasir adanya informasi yang tidak berimbang antara *principal* (pemilik modal) dan *agent* (penerima wewenang). Metode yang digunakan yakni metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data utama referensi atau jurnal yang relevan dengan objek kajian. Penelitian ini dapat disimpulkan peran teori agensi dalam meminimalisir asimetri informasi adalah dengan cara menggunakan metafora tabliq, indikator metafora tablig yakni adanya keterbukaan yang dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap yang dilakukan oleh agen kepada *shahibul mal* sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh *mudharib* juga dapat diketahui oleh *principal*. Penelitian ini dapat berimplikasi pada lembaga keuangan syariah ataupun dengan Lembaga independen yang di dalamnya mengatur aktivitas bisnis dengan sistem keadagenan.

***Kata kunci:*** *Teori Agensi, Asimetri informasi, Tabligh*

***Abstract***

*This research aims to construct one of the theories in Islamic finance, namely agency theory in relation to minimizing the existence of unbalanced information between the principal (owner of capital) and the agent (recipient of authority). The method used is the library research method using the main data source of references or journals relevant to the object of study. This study can be concluded that the role of agency theory in minimizing information asymmetry is by using the tabliq metaphor, the tablig metaphor indicator is the existence of openness that can provide clear and complete information carried out by the agent to shahibul mal so that all activities carried out by mudharib can also be known by the principal. This research can have implications for Islamic financial institutions or independent institutions that regulate business activities with an agency system.*

**Keywords:** *Agency Theory, Asymmetri Information, Tabligh*

## PENDAHULUAN

*Agency theory* (teori keagenan) dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory* yang merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan. Prinsip utama teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer (*agent*). Hubungan ini memberikan implikasi adanya potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda (Aswadi Lubis et al., 2016). Sebagai agent, secara moralitas bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemegang saham (*principal*), namun pada sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. (Michael Jensen et al., 1976).

Hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena informasi perusahaan yang dimiliki manajer lebih lengkap dibandingkan pemilik. Laporan keuangan diperlukan oleh kedua belah pihak. Laporan keuangan penting bagi para pengguna eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Khalil Ahmed Arbi et al., 2017).

Berbagai permasalahan yang timbul dalam hubungan antara *principal* dan *agent* yakni; (Setia Nur Maharani et al., 2008) *pertama*, ketika pihak agent memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal* sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. *Agent* yang seharusnya melaksanakan amanah principal telah melanggar komitmen dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik sesuai dengan arahan principal. *Kedua*, sulit dan mahalnya bagi principal untuk membuktikan usaha yang dilakukan manajemen. *Ketiga*, masalah pembagian resiko ketika *principal* dan *agent* memiliki perbedaan resiko yang ditanggung.

Berbagai situasi dan kompleksitas mengakibatkan konflik pada keagenan antara lain: konflik agensi tipe I terjadi antara pemegang saham dan manajer, yaitu situasi dimana kepemilikan saham perusahaan tersebar luas sehingga pemegang saham memiliki waktu yang sedikit untuk mengontrol secara langsung manajemen yang ada. Ketika hal ini terjadi, maka manajer akan mengejar kepentingan diri sendiri. Konflik agensi tipe II terjadi di perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi yaitu situasi dimana adanya kehadiran pemilik saham ikut berkontribusi besar dalam perusahaan sehingga mampu meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Akan tetapi hal ini akan berdampak kurang baik bagi manajer karena tidak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk mengelola perusahaan sehingga mengakibatkan kinerja tidak maksimal (B.L. Lim & S.H. Yen, 2011).

## TINJAUAN LITERATUR

### *Agency Theory*

*Agency theory* adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara principal dan agent dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Fokus teori keagenan mengatur hubungan antara prinsipal-agen dengan beberapa asumsi: 1) tentang manusia, yang mementingkan diri-sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*), cenderung menghindari resiko (*risk-aversion*); 2) tentang organisasi, di mana ada konflik kepentingan antar anggotanya; dan 3) tentang informasi, di mana informasi adalah suatu komoditi dan dapat dibeli (Eisenhardt, 1989).

Untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor (Jensen dan Meckling, 1976) mengidentifikasi adanya dua cara, yaitu: investor luar melakukan pengawasan (*monitoring*); atau manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Mekanisme *monitoring* yang mungkin dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan di perusahaan di antaranya adalah pengawasan oleh: dewan komisaris yang independen dari pihak manajemen, pasar *corporate control* melewati proses akuisisi, pasar manajer baik di internal perusahaan maupun di pasar manajer eksternal, pemegang saham besar seperti institusi keuangan, dan kepemilikan terkonsentrasi.

### Karakteristik *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa *agency theory* mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu

manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Karena unit analisis dalam agency theory adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu:

1. Agen dan pinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

*Agency theory* sama sekali tidak obyektif dan netral, tapi sebaliknya ia sarat dengan nilai kapitalistik yang dalam faktanya sangat eksploitatif. *Agency theory* secara samar memiliki kemampuan untuk merasionalkan, menormalisasi, dan melegitimasi berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan buruh yang seolah- olah kaum buruh memperoleh banyak manfaat dari sistem yang sesungguhnya sangat eksploitatif (Chwastiak, 1999).

Lebih lanjut (Chwastiak, 1999) menjelaskan bahwa dengan model tersebut semua tindakan manusia dilakukan dengan cara yang "rasional". Padahal, dalam kenyataaannya, rasionalitas meniadakan instrumen "rasa" dan "intuisi" yang ada dalam diri manusia, serta meniadakan mutual assistance dan reciprocal respect yang hidup dalam masyarakat. Rasionalitas, dengan demikian, mengidentitaskan dirinya pada logika kuantitatif dan kalkulatif yang terpisah dari unsur-unsur "irrasional" (atau superrasional). Sikap ini tidak ,memberikan tempat pada trust dan fairness yang sebetulnya juga merupakan perilaku manusia yang hakiki (Baiman, 1990). Rasionalitas agency theory tidak lebih dari rasionalitas utilitarianisme di mana semua kalkulasi berpulang pada utilitas-hedonis yang implikasinya memang dapat memarginalkan sifat-sifat "feminin" manusia (seperti: rasa, intuisi, spiritual, saling membantu, saling menghormati, saling percaya, jujur, dan lain-lainnya).

**Asimetri Informasi**

Asimetri informasi merupakan suatu kondisi di mana manajer (*agent*) memiliki lebih banyak informasi atas prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*). Teori agensi menekankan pada pentingnya pemilik perusahaan (*principal*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agent*) yang lebih mengerti dan memahami cara menjalankan suatu usaha. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) (Nunung Aini Rahmah & Ferikawita M. Sembiring et al., 2014)).

Ketika asimetri informasi tinggi, pemegang saham tidak memiliki sumber daya yang cukup, intensif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memantau tindakan manajer, di mana hal ini memberikan kesempatan kepada *agent* untuk tidak memberikan informasi secara terbuka (*transparance*). Adanya asimetri informasi ini akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut terkait dengan pengukuran kinerja manajer (Halim Julia et al., 2005)).

Urgensi informasi secara transparan akan memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada kedua bela pihak, baik *principal* maupun *agent,* karena dengan sifat *tabligh* yang dimiliki oleh *agent* dapat meningkatkan kepercayaan *principal* memberikan sejumlah dana untuk dikelola dan dikembangkan dalam bentuk usaha bahkan dalam jumlah yang banyak sekalipun. Menurut

Beach terdapat dua tipe model *principal-agent* yaitu: (a) model aksi tersembunyi (*moral hazard*) pada model ini *principal* tidak dapat mengobservasi/mengamati tindakan yang dilakukan *agent*, misalnya sejauh mana agen menyelesaikan tugas, (b) model informasi tersembunyi (*adverse selection*). Pada model ini agen memiliki informasi yang bersifat pribadi dan mengetahui cara lebih baik daripada *principal* (Aswadi Lubis, 2016).

Asymetri informasi merupakan kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya, artinya tidak adanya keseimbangan informasi yang diterima oleh masing-masing pihak. Menurut Healy dan Palepu menyebutkan ada 3 kondisi yang menyebabkan lahirnya *information asymetri* yaitu: (1993).

a) Para manajer perusahaan memiliki atau mengetahui informasi secara superior atas aktivitas operasional dan strategi bisnis perusahaan;
b) Insentif yang diberikan kepada manajer perusahaan tidak diakomodasi secara sempurna dari para pemegang saham (*principal*);
c) Aturan-aturan akuntansi dan pengauditan tidak sempurna dan tidak transparan.

**Model Konseptual**

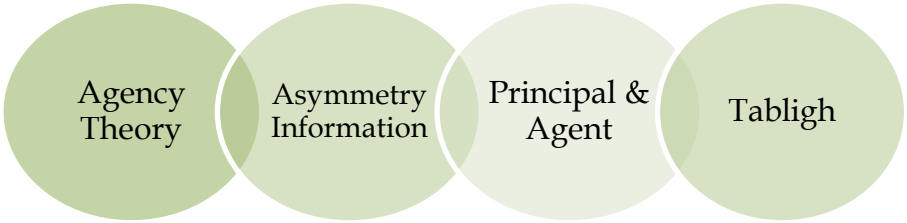


**Gambar 1**: Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Desain Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada *library research* yakni penelusuran mendalam terkait dengan berbagai macam referensi yang relevan dengan focus kajian, setelah itu dilakukan analisis yang mendalam dengan menggunakan metode interpreasi konsep.

### Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur pustaka untuk dielaborasi secara mendalam dan konprehensip. Intrumen penelitian yakni dengan menggunakan cacatan-catatan kecil atau perangkat lain yang dapat mendukung pengumpulan data.

### Metode Analisis Data

Anaslisi data dilakukan secara bertahap berdasarkan informasi literatul yang diperoleh lebih awal, prosesnya yaitu mengungpulkan semua data terlebih dahulu lalu dilakukan interpretasi yang mendalam untuk memperoleh data yang diinginkan.

## TEMUAN EMPIRIS

Temuan empiris yang merupakan novelty atau kebaruan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metafora tabligh sebagai alat ukur untuk memberikan informasi secara transparan dan akuntabel. Salah satu prinsip tabligh ditemukan bahwa pada hakikatnya prinsip

kejujuran dan amanah merupakan tujuan utama yang harus dilakukan bersama, sehingga tidak muncul keragu-raguan antara *principal* dan juga *agent.* Tabligh di sini mengambil peran penting untuk memberikan informasi secara lengkap sehingga antara pemodal dan pengelola sama-sama mendapatkan informasi yang berimbang atau tidak terjadi asimeti informasi. Hakikatnya konsep tabligh ini dalam ekonomi Islam diyakini sebagai suatu konsep yang apabila diterapkan akan mendatangkan kesmashlahatan bersama selain itu juga tentunya akan memperoleh profit secara bersama-sama secara finansial.

## PEMBAHASAN

### Agency Theory dan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

*Agency theory* menjadi sangat relevan bagi perbankan syariah, hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah/ *Investment Account Holders* (IAH) dan pemegang saham (Lubis, 2016). (Antonio, 2001) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi, di antaranya: *side streaming* (penyimpangan), lalai dan kesalahan yang disengaja; dan, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* dalam pembiayaaan perbankan syariah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *asymmetric information* dalam hubungan antara *principal* (*shahib al-mal*) dan *agent* (*mudharib*). (Mishkin, 2008) mengemukakan bahwa dalam pasar keuangan, satu pihak seringkali tidak cukup mengetahui tentang pihak lain untuk membuat keputusan yang akurat. Ketidaksamaan ini disebut *asymmetric information*. Kurangnya informasi menciptakan masalah dalam sistem keuangan pada dua hal, yaitu sebelum transaksi dilakukan yaitu *adverse selection* dan sesudah transaksi terjadi yaitu *moral hazard*.

*Adverse selection* merupakan permasalahan *asymmetric information* yang terjadi, yakni sebelum disalurkannya kredit/pembiayaan. *Adverse selection* merupakan permasalahan yang timbul ketika pemilik dana memilih entrepreneur yang akan diberikan kredit/pembiayaan (Tarsidin, 2010). Hal ini dikarenakan pemilik dana tidak mengetahui dengan pasti karakteristik mudharib. (Mishkin et al., 2008) menjelaskan bahwa adverse selection terjadi ketika peminjam potensial yang kemungkinan besar membuahkan hasil yang tidak diinginkan (ad- verse) yaitu risiko kredit yang buruk. Irfandy dalam (Zharfan et al., 2012) menjelaskan bahwa *adverse selection* adalah masalah yang timbul dalam melakukan seleksi nasabah sebelum kontrak kredit atau pembiayaan dilakukan. Calon nasabah yang berisiko tinggi tentunya tidak akan pernah jujur mengatakan bahwa unit usaha yang diajukan kreditnya tergolong tinggi.

(Tarsidin, 2010) berpendapat bahwa dalam kontrak bagi hasil tidak boleh diperjanjikan jumlah profit. Skema bagi hasil ditetapkan dimuka dan akan tetap berlaku berapapun profit yang diperoleh *mudharib* dari usaha atau proyek yang dijalankan. Dengan demikian, mudharib kurang termotivasi untuk mencapai suatu jumlah profit tertentu. Hal ini menyebabkan adanya karakteristik tinggi pada saat mengajukan pembiayaan dan memperoleh rasio bagi hasil yang tinggi baginya. Satu hal yang mendorong timbulnya persoalan keagenan adalah adanya informasi yang tidak simetris (Manzilati, 2011).

Hakikat *mudaharabah* harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan kepercayaan penuh pemodal (investor/*shahib al-mal*) kepada pengelola (agen/mudharib) atau "*trust based financing*", sehingga tidak ada keragu-raguan pemodal terhadap pengelola (dalam Shabir, 2004, 43; dalam (Widodo, 2014). Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pemodal harus berhati-hati dalam memberikan amanah pengelolaan uang kepada *mudharib*. Diharapkan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik baiknya (Widodo, 2014).

Manajemen risiko setelah realisasi pembaiayaan antara lain dalam hal penanganan

pembiayaan yang jatuh tempo, pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, kesalahan nasabah dalam mengelola usaha, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah (Musolin 2005: 14). Untuk mengurangi kerugaian akibat penyembunyian keuntungan, perbankan syariah dapat melakukan *wa'ad*, yaitu kesediaan nasabah untuk memberikan bagi hasil minimal, sehingga kecurangan nasabah dapat diminamilisir (Musolin 2005). Ada *agency problem* dan *moral hazard* yang melekat pada pembiayaan berbasis bagi hasil. akan tetapi ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasi *agency problem*: *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal, *Mudharib* diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu (Waluyo, 2015).

***Meminimize Acymetri Information* Dalam Kontrak *Mudharabah***

*Principal-agent* dikenal dalam pembiayaan *mudharabah* adalah yang dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambil keputusan dalam Perusahaan (Jensen, M. C., & Meckling, W. H et al., 1976). Masalah *principal-agent* dalam akad *mudharabah* terjadi ketika kepentingan *mudharib* bertentangan dengan kepentingan pemilik dana (*shahibul mal*). Dalam hal ini *mudharib* (*agent*) bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan akan bertindak tidak berdasarkan kepentingan pemilik dana (Aswadi Lubis, 2016).

Sedangkan dalam akad *mudharabah*, pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga *mudharib* memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan peluang terjadinya *asymmetric information*. Antonio mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko *asymmetric information* maka *principal/shahibuul mal* menerapkan batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *agent/mudharib* yaitu: (Presley, JR. & Sessions, JG et al., 1994) *Pertama*, *mudharib* ikut dalam penyertaan sehingga menurunkan kecurangan sehingga tidak mendapatkan kerugian yang signifikan; *Kedua*, *shahibul mal* menetapkan batasan bagi *mudharib* untuk melakukan bisnis yang memiliki resiko yang rendah; *Ketiga*, transparansi keuangan khususnya pada pelaporan arus kas; *Keempat*, persyaratan bagi *mudharib* untuk melakukan bisnis yang memerlukan biaya relative rendah sehingga kemungkinan untuk resiko dapat diminimalisir.

Khalil, menyebutkan bahwa pada umumnya terdapat tiga masalah utama keagenan yang terkait dengan akad *mudharabah*, yaitu: (Khalil, Abdel-Fattah, 2000)

a) Besarnya ketidakpastian (*uncertainty*), artinya adalah kontrak bagi hasil merupakan kontrak yang bisa dipastikan adanya ketidakpastian pendapatannya. Khususnya pada kontrak *mudharabah* ketidakpastian ini berasal dari hasil yang terkonsentrasi sepenuhnya pada keputusan yang dibuat oleh *agent*. Lebih jauh agen tidak diawasi secara penuh oleh *principal/shahibul mal*, sehingga berpeluang menimbulkan masalah seperti tidak transparan dalam menyampaikan hasil yang diperoleh.
b) Linieritas yang ekstrim (*extreme linearity*), maksudnya adalah *linier sharing* antara hasil dengan kinerja dari proyek yang dihasilkan, hasil akhir yang diharapkan tergantung sepenuhnya pada kemampuan/keterampilan pengusaha (*agent*) dan tingkat usaha yang dihasilkan;
c) Terkait dengan kekuatan untuk menentukan pilihan/kebijakan (*discretionary power*). Kontrak *mudharabah* juga merepresentasikan suatu kekuatan kebijakan semenjak agen memulai menangani proyek dan mempunyai hak untuk membuat keputusan terkait dengan investasi dan distribusi aliran kas berikutnya.

**Mereduksi *Agency Problem* Melalui Metafora *Tabligh***

Tabligh (*transparency*) dapat digunakan sebaga metafora dalam rangka *meminimize* asimetri informasi pada akad *mudharabah*, keterbukaan dilakukan dalam rangka memberikan informasi dengan jelas yang dilakukan oleh *agent* kepada *shahibul mal* sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh *mudharib* juga dapat diketahui oleh *principal*. Terjadinya kerugian dalam sebuah perusahaan karena informasi yang asimetri atau informasi yang tidak sempurana (Stiglitz, E. Joseph, 1992).

Selanjutnya menurut Iwan Triyuwono untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi dalam pembiayaan *mudharabah* maka yang harus memperhatikan keterbukaan laporan keuangan dalam artian harus memiliki sifat *tabhligh*. Prinsip ini merupakan kebutuhan dasar dalam Islam, dimana berlaku bagi setiap manusia sebagai khalifah. Kebenaran dalam prinsip ini, bukan hanya benar secara syariah, tapi merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan (Iwaan Triyuwono et al., 2000) Prinsip keterbukaan juga bisa dilihat dalam QS An-Nisa'/4: 135. Prinsip mendasar dari konsep ini yakni pelaporan kepada Allah karena keberadaan manusia sebagai penerima amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Transpasansi informasi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan informasi tentang program kerja, transparansi dalam perencanaan, pegalokasian dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sadaqah, serta keterbukaan dalam penganggaran. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk meminimize asimetri informasi (Iwaan Triyuwono et al., 2000).

## KESIMPULAN

Masalah keagenan pada kategori keuangan syariah rentan terjadi karena adanya *asymmetric information* dalam hal ini *principal* sebagai *shahib al-mal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *mudharib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Padahal, pembiayaan dengan akad mudharabah dan *musharakah* pada keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi karena tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diterima nantinya antara *principal* dan *agent* tidak pasti. Pihak bank syariah hanya bisa memprediksi pendapatan yang nantinya akan diterima melalui pengumpulan informasi pada saat menyeleksi calon nasabah dan usaha yang akan dibiayai. Tabligh (*transparency*) dapat digunakan sebaga metafora dalam rangka *meminimize* asimetri informasi pada akad mudharabah, keterbukaan dilakukan dalam rangka memberikan informasi dengan jelas yang dilakukan oleh *agent* kepada *shahibul mal* sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh *mudharib* juga dapat diketahui oleh *principal*. Terjadinya kerugian dalam sebuah perusahaan karena informasi yang asimetri atau informasi yang tidak sempurana.

## REFERENSI

Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ahmed Arbi, Khalil dkk. (2017). "*Minimizing Asymmetric Information in Online Markets Through Knowledge Management*". Journal International of Management Excellence, 8(2), 925.

Aini Rahmah, Nunung & Ferikawita M. Sembiring. (2014). "*Suatu Tinjauan Teori Keagenan: Asimetri Informasi dalam Praktik Manajemen Laba*", Proceedings SNEB.

B.L. Lim & S.H. Yen. (2011). "*Agency Problem and Expropriation of Minority Shareholders*". Malaysian Journal of Economics Studies, 48(1), 37.

Chwastiak, Michele. (1999). "*Deconstructing The Prinsipal Agent Model: a View From The Bottom Critical Perspective on Accounting*", 8(4), 425- 441. https://doi.org/10.1006/cpac.1998.0275

Eisenhardt, K.M., (1989). "*Agency Theory: An Assessment and Review*", *Academic of Management Review*, 14(1), 57-74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003

Harahap, Sofyan Syafri. (2002). "*Riset Akuntansi Islam*". Jurnal Ekonomi Syari`ah Muamalah, 1(1), 103-116.

Julia, Halim. (2005). "*Pengaruh Manajemen Laba pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur*", Jurnal Manajemen, 2(1), 45.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*", Journal of Financial Economics, 3(4), 360.

Khalil, Abdel-Fattah. (2000). The Agency Contractual Features of Mudharabah (Profit-Sharing) Financing Contracts and Theory Impact On Accounting Policy Choise Interset-free Banking, Conference Papaers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, August 13-15.

Karim, Adiwarman A. (2001). "Perbankan Syari'ah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan." Orientasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, 3(3), 33-45.

Komalasari, Puput Tri, dan Baridwan, Zaki. (2001). "Asimetri Informasi dan Cost of Capital," Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 4(1), 64-81. http://doi.org/10.33312/ijar.51

Lubis, Aswadi. (2016). "*Agensi Problem dalam Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah*", Al-Qalam, 33(1), 52.

Maharani, Setia Nur. (2008). "*Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan alternatif Solusi*". Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 13(3), 484.

Healy & P. Palepu. (1993). "The effect of firms" Financial Disclosure Strategies on Stock Prices" Accounting Horizons, 1(1), h. 7.

Manzilati, Asfi. (2011). *Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 15(2), 281-293.

Maharani, S. N. (2008). "*Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi*". Jurnal Keuangan dan Perbankan, 12(3), 479-493.

Mishkin, Frederic S. (2008). *Ekonomi Uang: Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Musolin, Muhammad. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah. Yogyakarta: STEI, 2005.

Mulya E. Siregar & Nasirwan Ilyas. (2002). "*Penempatan Aktiva Produktif Bank Syariah*" Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah, 1(1).

Muhammad. (2014). *Masalah Agency dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah. Equilibrium*, 2(1), 1-18.

Multifiah, M.A., & Hurriati, L. (2015). Masalah Keagenan dan Penegakannya pada Pembiayaan Mudharabah: Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Malang). IJLEG, 1(1): 52-60.

Omar Hazeim Abdul Karem. (2003). "Kendala-Kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syari'ah di Indonesia", Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi, 1(2).

Presley, JR. & Sessions, JG. (1994). "*Islamic Economic: The Emergence of a New Paradigm*," The Economic Journal, 104(1), 584.

Rachmawati, Yacob Suparno & Nurul Qomariah. (2006). "Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta". Simposium Nasional Akuntansi IX. Ikatan Akuntan Indonesia.

Sarker, M.A.A. (1999). *Islamic Business Contracts, Agency Problem and Theory of Islamic Firm*. International Journal of Islamic Financial Services, 1(2): 12-28.

Sigit Pramono.(2006). "*Permasalahan Agency Theory dan GCG Pada Perbankan Syariah*". Media Akuntansi. 52(3).

Stiglitz, E. Joseph. (1992). "*Principal and Agent*," dalam The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, Journal, 2(2), 185.

Suyatmin dan Arfan Ikhsan. (2003). "*Masalah Agency Theory Dalam Perusahaan Suatu Tinjauan Terhadap Kontrak Bisnis Dalam Konsep Islam*". Benefit, 2(7).

Tarsidin. (2010). Bagi Hasil: *Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.

Triyuwono, Iwaan. (2000). "*Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai keadilan dalam Format Metafora Amanah*", Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 4(1), 20.

Widodo, Sugeng. (2014). *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: KAUKABA.

Waluyo, B. (2015). *Implementasi Mudharabah pada Pembiayaan di Bank Syariah.* Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 1(3), 225-236.

Zharfan, Refaat. (2012). "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-A Gent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar," *Skripsi.* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.